

ANALISIS PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh
Nila Permata Sari
NIM.2205040025

ABSTRAK

Eksibisionisme merupakan gangguan yang berhubungan dengan seksualitas. Dalam KUHP Nasional Penghapusan Pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria tertentu, khususnya berkaitan dengan ketidak mampuan bertanggung jawab akibat disabilitas mental atau intelektual. Permasalahan muncul ketika pelaku Tindak pidana eksibisionisme masih memiliki kesadaran saat melakukan kejahatan, sehingga memunculkan pertanyaan apakah pelaku dari tindak pidana eksibisionsime berhak menerima penghapusan pidana atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan pelaku eksibisionisme dalam memperoleh penghapusan pidana menurut KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analitis serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tindak pidana eksibisionisme telah memenuhi unsur dalam Pasal 406 KUHP Nasional. Pelaku eksibisionisme tetap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 39 KUHP Nasional, pelaku yang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab adalah pelaku yang saat melakukan tindak pidana kehilangan kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya akibat disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Eksibisionisme lebih tepat dinyatakan sebagai kurang mampu bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP Nasional. Maka dari itu, alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf) karena kondisi kejiwaanya tidak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana eksibisionisme, melainkan hanya dimungkinkan memperoleh pengurangan pidana dan/atau dikenai tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 KUHP Nasional.

Kata Kunci: Penghapusan Pidana, Eksibisionisme, KUHP Nasional

AN ANALYSIS OF THE ABITION OF CRIMINAL PENALTIES FOR PERPETRATORS OF EXHIBITIONISM UNDER THE CRIMINAL CODE

By
Nila Permata Sari
NIM. 2205040025

ABSTRACT

Exhibitionism is a disorder related to sexuality. Under the National Criminal Code, criminal exemption can only be granted to offenders who meet certain criteria, particularly those related to an inability to be held accountable due to a mental or intellectual disability. A problem arises when the perpetrator of an exhibitionism offense is still of sound mind while committing the crime, raising the question of whether the perpetrator of an exhibitionism offense is entitled to criminal exemption or not. This study aims to examine the status of exhibitionism offenders in relation to criminal exemption under the National Criminal Code. The research method employed is normative legal research using a legislative, conceptual, and analytical approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed descriptively. The results of the study show that the criminal act of exhibitionism fulfills the elements set forth in Article 406 of the National Criminal Code. Perpetrators of exhibitionism retain the capacity to be held criminally responsible. Based on Article 39 of the National Criminal Code, a perpetrator deemed incapable of criminal responsibility is one who, at the time of committing the criminal act, lost the ability to understand or control their actions due to a mental disability and/or an intellectual disability. Exhibitionism is more appropriately classified as a case of diminished responsibility, as provided for in Article 38 of the National Criminal Code. Therefore, grounds for exemption from criminal liability (exculpatory grounds) based on mental condition cannot be applied to perpetrators of exhibitionism; rather, they may only be eligible for a reduction in sentence and/or subject to measures in accordance with the provisions of Article 38 of the National Criminal Code.

Keywords: *Criminal Exemption, Exhibitionism, National Criminal Code*